

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Supryadi No. 5 Nganjuk Telp. / Fax. (0358) 328079
e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 telah terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam Rencana Kerja ini menjelaskan tentang realisasi pelaksanakan APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan yang selaras dengan arah Rencana Strategis yang telah disusun.

Mengingat penjabaran program dan kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 – 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan penyusunan.

Nganjuk, 22 Juli 2022

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Tingat I
NIP. 196706141989021002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

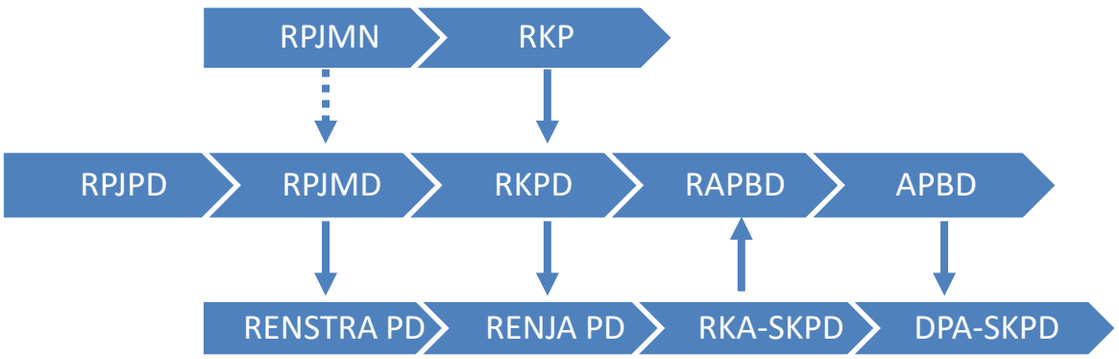
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk adalah **:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5315);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O17 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O13 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Ssitem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
- 2.5. Dampak pandemi Covid-19
- 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

3.4. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

3.5. Penanganan Pandemi Covid-19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.2. Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Badan kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapiltuasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Nganjuk

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8	**Urusan Pemerintahan Umum**									
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Perkantoran	95%	80%	85%	99%	116%	85%	95%	112%
8.01.01.2.01	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun	4 Laporan	12 bulan	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
8.01.01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	4 dok	4 dok	100%
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	12 bulan	25 dok	25 dok	100%	19 dok	19 dok	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.01.2.02.01	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	14 dok	14 dok	100%
8.01.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
8.01.01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	16 laporan	1 laporan x 2 semester	12 dok	12 dok	100%	4 dok	4 dok	80%
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dokumen	15 ASN	12 ASN	0	0%	1 paket	1 paket	100%
8.01.01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	15 ASN	12 ASN	0	0%	1 paket	1 paket	100%
8.01.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 orang	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	4 sub	4 sub	100%
8.01.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.0101.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	85%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.06.06	*Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	1 dokumen	-	4 unit	4 unit	100%	3 jenis	3 jenis	100%
8.01.01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	-	12 bulan	12 bulan	100%	3 jenis	3 jenis	100%
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	3 dokumen		12 bulan	12 bulan	100%	4 dok	4 dok	100%
8.01.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	3 Jenis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.09.08	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	90%	80%	80%	75%	94%	85%	80%	94%
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan karakter Kebangsaan**	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	300 orang	80%	80%	75%	94%	85%	80%	94%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.02.2.01.03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	-	100 orang	100 orang	100%	1081 orang	900 orang	83%
8.01.02.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	-	2 kali	1 kali	50%	25 kali	5 kali	20%
8.01.03.2.01	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK-AN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG- AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	90%	80%	80%	80%	100%	90%	90%	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.03.2.01.	**Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematauan Situasi Politik di Daerah**	Jumlah partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	10 Parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%	10 parpol	10 parpol	100%
8.01.03.2.01.03	*Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 orang	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.03.2.01.04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah-an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%
8.01.03.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	80%	2 lap	2 lap	100%	6 laporan	4 laporan	67%
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS**	Persentase ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev	90%	80%	80%	34%	43%	80%	83%	104%
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev	6 Ormas	5 ormas	6 ormas	1 ormas	17%	6 ormas	5 ormas	83%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.04.2.01.03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Ormas	5 ormas	6 ormas	1 ormas	20%	6 ormas	5 ormas	83%
8.01.04.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah*	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	80%	12 bulan	6 bulan	50%	6 ormas	5 ormas	90%
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90%	80%	80%	0%	0%	90%	80%	89%
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	100 orang	80%	12 bulan	0%	0%	90%	80%	89%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.05.2.01.04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	80%	12 bulan	-	0%	300 orang	250 orang	83%
8.01.05.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	80%	12 bulan	-	0%	6 kali	5 kali	83%
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADA-AN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	80%	80%	100%	125%	80%	100%	125%
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksa-naan Pemantapan Ke-waspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	80%	80%	100%	125%	85%	100%	118%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.05.2.01.04	*Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di* Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	80%	12 bulan	12 bulan	100%	12 lap	12 lap	100%
8.01.05.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewas-padaan Per-batasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah*	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 laporan	80%	12 bulan	12 bulan	100%	12 lap	12 lap%	100%
8.01.05.2.01.06	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Telah memaksimalkan Kinerja	Target kinerja tercapai	Mempertahankan kinerja
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	75%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Dampak Pandemi covid-19	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan kinerja
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidik-An Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Telah memaksimalkan Kinerja	Target kinerja tercapai	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas	34%	Sangat rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Disposisi dari Bapak Bupati yang belum turun	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	0%	Sangat rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Dampak Pandemi covid-19	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Melakukukan Refocusing anggaran
Program Peningkatan Kewaspada-An Nasional Dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	100%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kegiatan diprioritaskan pada programini	Target kinerja tercapai	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Tahun Renstra Perangkat Daerah				Realiasai Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	-
1.	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkat Wawasan Kebangsaannya	-	√	75%	80%	80%	85%	76%	80%	80%	85%	-
2.	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	-	-	70%	85%	85%	90%	67%	75%	85%	90%	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada table 2.2 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan maka tahun 2019 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaian kinerjanya.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Nganjuk.

1. Optimalisasi Pemantapan dan pemahaman Nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan.
2. Penguatan Idelogi Pancasila bagi elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agaman, ormas/LSM dan aparatur Pemerintah secara terinterasi dan berkelanjutan.
3. Peningkatan partisipasi semua komponen masyarakat, pengurus partai politik, ormas/LSM dalam kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.
4. Peningkatan status Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dari status Badan menjadi Badan.

2.4. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-1" Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban" serta sasaran strategis daerah meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tertib, tentram dan religius.

Tabel 2.6

Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2021

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Tujuan SDGs 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan									
	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	80	80	67	80	67	80	75	

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk emberikan kontibusi terhadap tujuan ke- 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

2.5. Dampak pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu

dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	***PROGRAM KEGIATAN SKPD***				**13,451,570,750**	***PROGRAM KEGIATAN SKPD***				**17,439,796,176**	
A.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA***				**2,825,715,800**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA***				**2,673,048,688**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah laporan perencaan dan evaluais kinerja Perengkat Daerah yang disusun	4 dok	22,250,000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah laporan perencaan dan evaluais kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	32,070,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbang pol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	22,250,000	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	32,070,000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dukumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	12 bulan	2,133,015,800	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	1,714,342,068	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	2,124,816,000	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	1,699,852,068	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbang pol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	999,800	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,120,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Kesbang pol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	16 Laporan	7,200,000	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/ Semesteran SKPD*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	16 Laporan	13,370,000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dokumen	37,500,000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dokumen	43,850,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbang pol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	7,500,000	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	Kesbang pol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3,750,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	30,000,000	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 orang	40,100,000	Sub Keg Baru
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Terwujudnya tata kelola administrrasi umum PD	12 bulan	158,000,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	164,692,050	
	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Kesbang pol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	50,000,000	*Penyediaan Bahan Logistik Badan*	Kesbang pol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	60,176,880	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbang pol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	11,500,000	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Kesbang pol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	10,105,170	
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbang pol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	6,500,000	*Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Kesbang pol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	6,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	90,000,000	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	88,410,000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kesbang pol	Terwujudnya tertib pengeloaan barang PD	12 bulan	65,000,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	1 dokumen	139,712,120	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbang pol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	65,000,000	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kesbang pol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	139,712,120	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				119,950,000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kesbang pol	Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	3 dokumen	110,205,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	70,000,000	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	73,200,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	48,450,000	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	35,505,500	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kesbang pol	Terwujudnya pe-meliharaan barang yang mendukung kinerja PD	12 bulan	290,000,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kesbang pol	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	3 Jenis	468,176,950	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Kesbang pol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	65,500,000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan*	Kesbang pol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	116,479,300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbang pol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	14,500,000	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kesbang pol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	22,700,000	
	Pemeliharaan/Reha-bilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Kesbang pol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	210,000,000	*Pemeliharaan/Reha-bilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya*	Kesbang pol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	328,997,650	
II,	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kesbang pol	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkat wawasan kebangsaannya	80%	185,637,450	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kesbang pol	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	90%	210,241,150	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan karakter Kebangsaan	Kesbang pol	Terwujudnya warga negara yang ber-wawasan ke-bangsaan	100 orang	185,697,950	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantap-an Pelaksanaan Bidang Ideologi dan karakter Kebangsaan**	Kesbang pol	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	1081 orang	210,241,150	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	181,797,950	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1081 orang	206,901,150	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbang pol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	3,900,000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	3,340,000	
III.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kesbang pol	Persentase organisasi sosial politik yang mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah daerah	80%	7,934,627,500	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kesbang pol	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	90%	5,440,711,278	
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematauan Situasi Politik di Daerah	Kesbang pol	Terwujudnya Stabilitas dan situasi sosial politik di Daerah yang kondusif	50 orang	7,934,627,500	**Perumusan kebijakan Teknis dan Pe-mantapan Pelaksa-naan Bidang Pen-didikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demo-krasi, Fasilitasi Kelembagaan Peme-rintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematauan Situasi Politik di Daerah**	Kesbang pol	Jumlah partai poltik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	10 partai	5,440,711,278	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 orang	130,000,000	*Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demo-krasi, Fasilitasi Ke-lembagaan Peme-rintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang	224,676,278	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 partai politik	7,803,427,500	*Pelaksanaan Koor-dinasi di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demo-krasi, Fasilitasi Kelem-bagaan Peme-rintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 partai politik	5,213,715,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 laporan	1,200,000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 laporan	2,320,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbang pol	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90%	1,615,000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kesbang pol	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90%	923,217,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbang pol	Tersusunnya bahan kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan	10 ormas	1,615,000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kesbang pol	Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev	6 ormas	923,217,800	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 orang	415,000	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 ormas	920,317,800	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 laporan	1,200,000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah*	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 laporan	2,900,000	
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	Kesbang pol	Persentase rekomendasi Forum Ke-waspadaan dini yang ditindak-lanjuti	80%	101,200,000	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA***	Kesbangpol	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90%	55,899,960	
1	**Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasili-tasi Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika, Peng-hayat Kepercayaan di Daerah**	Kesbang pol	Terfasilitasinya Kegiatan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat	12 bulan	101,200,000	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	Kesbang pol	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	100 orang	55,899,960	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100,000,000	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	54,999,960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	1,200,000	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Kesbang pol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	900,000	
VI.	**PROGRAM PENING-KATAN KEWASPADA-AN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kesbang pol	Persentase konfliks sosial yang tertangani	80%	2,402,775,000	**PROGRAM PENING-KATAN KEWASPADA-AN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kesbang pol	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	8,136,677,300	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksa-naan Pemantapan Ke-waspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbang pol	Terwujudnya peningkatanan penanganan konflik sosial	3 kasus	2,402,775,000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksa-naan Pemantapan Ke-waspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Kesbang pol	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	8,136,677,300	
	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	1,409,775,000	*Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di* Daerah	Kesbang pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	416,882,300	
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbang pol	Tersusunnya Laporan Stabilitas dan Kondusfitas Daerah yang mantap.	3 Laporan	1,200,000	*Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewas-padaan Per-batasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah*	Kesbang pol	Tersusunnya Laporan Stabilitas dan Kondusfitas Daerah yang mantap.	3 Laporan	900,000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	Kesbang pol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	991,800,000	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota*	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	7,718,895,000	

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kesbangpol	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	-
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kesbangpol	Jumlah laporan perencaan dan evaluais kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kesbangpol	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	16 Laporan	-
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kesbangpol	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dokumen	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-
	Bimbungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	Baru

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	-
	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	-
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	-
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kesbangpol	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	1 dokumen	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	-
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	3 dokumen	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kesbangpol	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	3 Jenis	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan/Reha-bilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-
II.	**PROGRAM PENGUAT-AN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kesbangpol	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	90%	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantap-an Pelaksanaan Bidang Ideologi dan karakter Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	1081 orang	-
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1081 orang	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	-
III.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kesbangpol	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	90%	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah partai poltik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	10 partai	-
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 partai politik	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 laporan	-
IV.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90%	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev	6 ormas	-
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 ormas	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediase Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 laporan	-
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	Kesbangpol	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90%	-
1	**Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah**	Kesbangpol	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	100 orang	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	-
VI.	**PROGRAM PENING-KATAN KEWASPADA-AN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kesbangpol	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	-
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksa-naan Pemantapan Ke-waspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Kesbangpol	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	-
	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewas-padaan Per-batasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Tersusunnya Laporan Stabilitas dan Kondusfitas Daerah yang mantap.	3 Laporan	-
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbanpol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	Sub Kegiatan Baru

Sumber : Hasil kajian Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 mengangkat tema "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius". Adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif" dengan target kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Persentase stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religus	85%
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	90%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.4. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;

3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.5 Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor

strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**17,439,796,176**					**12,980,850,500**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,673,048,688**					**2,884,450,000**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**32,070,000**					**30,000,000**
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Laporan	85 %	32,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	30,000,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,714,342,068**					**2,159,500,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	15 org/bln	85 %	1,699,852,068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	2,150,000,000
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	85 %	1,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	1,000,000
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	16 Laporan	85 %	13,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	8,500,000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**43,850,000**					**38,000,000**
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase administrasi kepegawaian	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 paket	85 %	3,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	95 %	8,000,000
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase administrasi kepegawaian	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	30 orang	85 %	40,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	95 %	30,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**164,692,050**					**165,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya tata kelola administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 paket	85 %	60,176,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	95 %	50,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya tata kelola administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 paket	85 %	10,105,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	95 %	12,500,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya tata kelola administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 dokumen	85 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	95 %	7,500,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya tata kelola administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	36 Laporan	85 %	88,410,000			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkan	95 %	95,000,000
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**139,712,120**					**65,000,000**
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	7 unit	85 %	139,712,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	65,000,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**110,205,500**					**126,950,000**
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 laporan	90 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	1,500,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 laporan	90 %	73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	75,000,000
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 laporan	90 %	35,505,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	50,450,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**468,176,950**					**300,000,000**
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang yang dipelihara	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	8 unit	85 %	116,479,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	70,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang yang dipelihara	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	32 unit	85 %	22,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	15,000,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang yang dipelihara	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 unit	85 %	328,997,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 %	215,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**210,241,150**					**204,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**210,241,150**					**204,000,000**
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1081 orang	80 %	206,901,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	90 %	200,000,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 Laporan	80 %	3,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	90 %	4,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**5,440,711,278**					**7,954,925,500**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**5,440,711,278**					**7,954,925,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	300 orang	80 %	224,676,278	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	90 %	150,000,000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 partai	80 %	5,213,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	90 %	7,803,425,500
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 laporan	80 %	2,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev	90 %	1,500,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**923,217,800**					**421,200,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**923,217,800**					**421,200,000**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya pembinaan ormas/LSM di Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	6 ormas	90 %	920,317,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90 %	420,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya pembinaan ormas/LSM di Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 laporan	90 %	2,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90 %	1,200,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**55,899,960**					**106,200,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**55,899,960**					**106,200,000**
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, dan ras	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	300 orang	80 %	54,999,960			Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90 %	105,000,000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, dan ras	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 Laporan	80 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90 %	1,200,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**8,136,677,300**					**1,410,075,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**8,136,677,300**					**1,410,075,000**
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terciptanya suasana yang kondusif di Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	100 orang	90 %	416,882,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90 %	416,775,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terciptanya suasana yang kondusif di Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 laporan	90 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90 %	1,500,000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya suasana yang kondusif di Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 dokumen	90 %	7,718,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90 %	991,800,000
												TOTAL	**17,439,796,176**					**12,980,850,500**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Umum.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1.	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi dan elektronik government menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)	17.439.796.176

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)
1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	90%	1.242.062.500

TABEL 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Urusan Pemerintahan Umum			
	Kesatuan Bangsa dan Politik			**17,439,796,176**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Perkantoran**	95%	**2,673,048,688**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun**	4 Laporan	**32,070,000**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	32,070,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	3 dokumen	**1,714,342,068**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	1,699,852,068
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,120,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	16 laporan	13,370,000
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan**	2 dokumen	**43,850,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3,750,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 orang	40,100,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan**	4 dokumen	**164,692,050**
	Pengadaan bahan logistik Badan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	60,176,880
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	10,105,170
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	6,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	88,410,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan**	1 dokumen	**139,712,120**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	139,712,120
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan**	3 dokumen	**110,205,500**
	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	73,200,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	35,505,500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan**	3 Jenis	**468,176,950**

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	116,479,300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22,700,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	328,997,650
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev**	90%	**210,241,150**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev**	300 orang	**210,241,150**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	206,901,150
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Ideologi, Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	3,340,000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev**	90%	**5,440,711,278**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah, dan yang dimonev**	10 Parpol	**5,440,711,278**
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 orang	224,676,278
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 parpol	5,213,715,000

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	2,320,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev**	90%	**923,217,800**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev**	6 Ormas	**923,217,800**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pegawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Ormas	920,317,800
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pegawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	2,900,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	**Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev**	90%	**55,899,960**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev**	100 orang	**55,899,960**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahnan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	54,999,960
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pegawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	900,000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev**	90%	**8,136,677,300**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev**	90%	**8,136,677,300**

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan di Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	416,882,300
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan di Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 laporan	900,000
	Pelakasanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	7,718,895,000

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Belanja Hibah Uang	DPC PDIP	777,220,000	155,444 x 5,000.00 = 777,220,000	
			DPC PKB	570,160,000	114,032 x 5,000.00 = 570,160,000	
			DPC Partai Hanura	294,705,000	58,941 x 5,000.00 = 294,705,000	
			DPC Partai Gerindra	289,690,000	57,938 x 5,000.00 = 289,690,000	
			DPD Partai Golkar	346,470,000	69,294 x 5,000.00 = 346,470,000	
			DPC Partai Demokrat	225,855,000	45,171 x 5,000.00 = 225,855,000	
			DPD Partai Nasdem	159,005,000	31,801 x 5,000.00 = 159,005,000	
			DPD PKS	148,590,000	29,718 x 5,000.00 = 148,590,000	
			DPC PPP	90,685,000	18,137 x 5,000.00 = 90,685,000	
			DPD Partai Perindo	62,075,000	12,415 x 5,000.00 = 62,075,000	
			KPU	902,240,000		
			Bawaslu	1,347,020,000		
	JUMLAH			5,213,715,000		
2	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pegawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Belanja Hibah Uang	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	75,000,000		
			Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk	200,000,000		
			Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia	10,000,000		
			Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nganjuk	150,000,000		
			Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk	250,000,000		
			Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk	150,000,000		
	JUMLAH			835,000,000		
3	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	Belanja Hibah Barang	Polres	5,000,000,000		
			Kodim	2,000,000,000		
	JUMLAH			7,000,000,000		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19670614 198902 1 002